

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2020. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bauman, Richard W., dan Tsvi Kahana (eds.). 2006. *The Least Examined Branch: The Role of Legislatures in the Constitutional State*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Beatty, David M. 2004. *The Ultimate Rule of Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Bouckaert, Geert, dan Christopher Pollitt. 2011. *Public Management Reform: A Comparative Analysis*. 3rd Edition. Oxford: Oxford University Press.
- Breyer, Stephen. 1982. *Regulation and Its Reform*. Cambridge: Harvard University Press.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Calabresi, Steven G., dan Christopher S. Yoo. 2008. *The Unitary Executive: Presidential Power from Washington to Bush*. New Haven: Yale University Press.
- Farida Indrati, Maria. 1998. *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Farida Indrati, Maria. 2020. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Frederickson, H. George. 1971. *The New Public Administration*. Alabama: University of Alabama Press.
- Friedmann, W. 1967. *Legal Theory*. London: Stevens & Sons.
- Fuller, Lon L. 1969. *The Morality of Law*. Revised Edition. New Haven: Yale University Press.
- Gazali. 2022. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*. Editor: Bahtiar. Mataram: Sanabil.
- Hadjon, Philipus M., dkk. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harjono. 2009. *Transformasi Demokrasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI.
- Huda, Ni'matul. 2007. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Huda, Ni'matul. 2020. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

- Indroharto. 2005. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Buku I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Jennings, W. Ivor. 1959. *The Law and the Constitution*. London: University of London Press.
- Kelsen, Hans. 1945. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press.
- Konijnenbelt, Willem. 1988. *Hoofdstukken van Administratief Recht*. Utrecht: Lemma.
- Lubis, M. Solly. 1989. *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*. Bandung: Mandar Maju.
- Luhmann, Niklas. 1995. *Social Systems*. Stanford: Stanford University Press.
- Mainwaring, Scott, dan Matthew Soberg Shugart (eds.). 1997. *Presidentialism and Democracy in Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Manan, Bagir. 2001. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Manan, Bagir. 2003. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Manan, Bagir. 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mau, Hedwig Adianto, dan Tinton Ditisrama. 2024. *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori dan Penerapan*. Purwokerto: Amerta Media.

- Natabaya, H.A.S. 2019. *Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Nonet, Philippe, dan Philip Selznick. 1978. *Law and Society in Transition*. New York: Harper & Row.
- North, Douglass C. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nuruddin, dan Ahmad Muhasim. 2022. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Lombok Barat: CV Alfa Press.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ridwan, Juniarso, dan Achmad Sodik Sudrajat. 2012. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Saldi Isra. 2018. *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergeseran dan Penguatan Sistem Presidensial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiadi, Wicipto. 2022. *Ilmu dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiadi, Wicipto. 2026. *Politik Hukum Indonesia di Era Disrupsi: Kontestasi Kekuasaan, Dinamika Regulasi, dan Arah Pembaruan*. Depok: Rajawali Pers.
- Soehino. 2005. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

- Soekanto, Soerjono. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan ke-10. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soejito, Irawan. 1988. *Teknik Membuat Undang-Undang*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soemantri, Sri. 1989. *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Strauss, Peter L. 2002. *Administrative Justice in the United States*. Durham: Carolina Academic Press.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tjandra, W. Riawan. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Tutik, Titik Triwulan. 2017. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Vernando, dkk. 2022. *Hukum Tata Negara*. Bali: INFES Media.
- Wintgens, Luc J. (ed.). 2002. *Legisprudence: Practical Reason in Legislation*. Hampshire: Ashgate Publishing.
- Xanthaki, Helen. 2022. *Drafting Legislation: Art and Technology of Rules for Regulation*. Oxford: Hart Publishing.

Xanthaki, Helen. 2023. *Principles of Legislative Drafting*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Yuliandri. 2009. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yuristia Mardhiyah, Rika. 2021. *Hukum Tata Negara dalam Bingkai Sejarah dan Perkembangan Ketatanegaraan di Indonesia*. Ponorogo: CV Senyum Indonesia

B. Artikel Ilmiah / Jurnal / Makalah

Attamimi, A. Hamid S. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Disertasi. Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.

Fuji Syifa Safari, Ivans Januardy, Satriya Nugraha, dan Eny Susilowati. 2026. “Urgensi Pembentukan Badan Regulasi Nasional dalam Meningkatkan Kualitas Legislasi di Indonesia.” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.56128/jkih.v6i1.832>.

Hendra Nurtjahjo. 2005. “Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 35, No. 3.

Manan, Bagir. 2000. “Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah.” Makalah Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 13 Mei 2000.

Santoso, Budi. 2023. "Pengawasan Tindakan Administratif di Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum FH STIH Pertiba*, Vol. 5, No. 2.

Setyonagoro, Permadi. 2023. "Problem Hukum Keberadaan Peraturan Perundang-Undangan dengan Nomenklatur 'Peraturan Kepala Badan/Lembaga' dan 'Peraturan Badan/Lembaga' pada Lembaga Pemerintah Nonkementerian." Makalah Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian, Universitas Surabaya, 6 Juli 2023.

Sjafri, Fitriani Ahlan. 2016. "Administrasi Negara dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." Dalam Harsanto Nursadi (ed.), *Hukum Administrasi Negara Sektoral*. Depok: Center for Law and Good Governance Studies (CLGS) dan Badan Penerbit FHUI.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah.

Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025.

Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

D. Kamus dan Sumber Daring

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Entri: Prakarsa.*
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prakarsa> (diakses 11 Oktober 2025).

Sistem Perencanaan Hukum (SIRENKUM). “Data Pemrakarsa RUU JPH.”
(diakses 20 Oktober 2025).

E. Dokumen dan Data Resmi

Keputusan DPR RI Nomor 23/DPR RI/I/2025–2026 tentang Perubahan Program
Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025–2029 dan
Perubahan Kedua Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-
Undang Prioritas Tahun 2025.

Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.01.01-
1890 Tahun 2024.

Data Sistem Perencanaan Hukum Nasional (SIRENKUM), Program Legislasi
Nasional Tahun 2020–2024 dan Tahun 2025–2029.

Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi
Penanganannya, Kementerian PPN/Bappenas, 2019.